

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatk gelar sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH :
NIA AUDINA
175310573

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nia Audina
NPM : 175310573
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa,
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di
Kabupaten Kepulauan Meranti

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681

Fax. (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL


1. Nama Mahasiswa : **NIA AUDINA**
2. NPM : 175310563
3. Hari/Tanggal : Rabu, 17 Maret 2021
4. Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sidang dibuka oleh **Dr. Zulhelmy, SE., MSi., Ak, CA., ACPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan dilanjutkan diadakan sesi tanya jawab.

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak,CA.,ACP: <ul style="list-style-type: none">• Dihapuskan kalimat di bawah judul• Rapikan daftar isi• Tambahkan alasan peneliti memilih lokasi objek• Perbaiki populasi dan sampel• Perbaiki daftar Pustaka menggunakan mendeley	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman cover Terlihat di halaman I Terlihat di halaman 8 dan 9 Terlihat di halaman 47 dan 48 Terlihat di halaman 56	

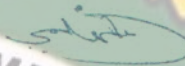
2	Muhammad Fahdi, SE.,M.Ak: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki populasi dan sampel • Tambahkan Alasan Pengambilan Objek 	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 49	
		Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman 8 dan 9	

Mengetahui,

Disetujui,



Hj. Siska, SE., M.SI, Ak, CA
ACPA
 Ketua Prodi Akuntansi S1



Dr. Zulhelmy, SE., MSi., Ak, CA.,
Pembimbing



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DA BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : **NIA AUDINA**
2. NPM : 175310573
3. Hari/ Tanggal : Rabu, 22 desember 2021
4. Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sidang dibuka oleh **Dr. Zulhelmy, SE., MSi., Ak, CA., ACPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Azwirman, Dr, SE. M.Acc., CPA: <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan hasil dari kuisisioner yang diperoleh dalam bentuk tabel • Hasil analisis gunakan data spss • Hasil pembahasan lebih detail dengan melihat dari kuisisioner untuk setiap pembahasan hipotesis 	<p>Sudah di perbaiki.</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki.</p>	<p>Terlihat di halaman 60.61.62.63</p> <p>Terlihat di halaman 60,61,62,63</p> <p>Terlihat di halaman 82</p>	
2	Yolanda Pratami, S.E., M.AK. : <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Kata Kunci (Abstrak) • Penjelasan kerangka pemikiran • Hipotesis 	<p>Sudah diperbaiki.</p> <p>Sudah diperbaiki.</p> <p>Sudah diperbaiki.</p>	<p>Terlihat di halaman: i</p> <p>Terlihat di halaman : 42-44</p> <p>Terlihat di halaman :</p>	

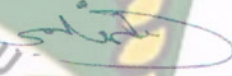
<ul style="list-style-type: none"> • Nama desa pada sampel tidak perlu dijabarkan • Nilai signifikan H1 tidak sesuai • Tambahkan pengaruh uji f pada kesimpulan 	Sudah diperbaiki.	44-46	
	Sudah diperbaiki		Terlihat dihalaman: 49-50
	Sudah diperbaiki		Terlihat dihalaman: 82
			Terlihat dihalaman: 88

Mengetahui,



Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi SI

Disetujui



Zulhelmy, Dr, SE, MSi, Ak., CA
Pembimbing





UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

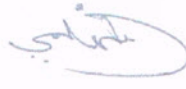
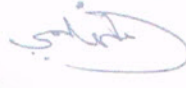


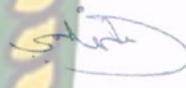

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761)
674674 Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NIA AUDINA
 NPM : 175310573
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SPONSOR : Zulhelmy, Dr, SE, MSi, Ak., CA
 CO SPONSOR : -

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Mithik :

Tanggal	Catatan		Berita Acara	TandaTangan	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
19-12-2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang Masalah - Fokus bagaimana penerapan anggaran desa. - Data tentang kompetensi aparatur desa. - Masukkan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitiina 		
25-01-2021	X		<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian - Untuk pengambilan sample menggunakan purposive sampling jelaskan kriterianya sehingga akhirnya dari 98 Desa, hanya 10 Desa yang diambil. - Respondennya yang 5 sebutkan, misalnya (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dll) 		

12-02-2021	X		- Daftar pustaka: Ikuti buku pedoman penulisan tesis. Usahakan cari sumber referensi yang terbaru.		
05-03-2021	X		- ACC Proposal		
15-11-2021	X		- Lanjut Skripsi		
17-11-2021	X		- Abstrak - Perbaiki Bab IV - R square nya belum dibahas - Sarannya		
19-11-2021	X		- Abstraknya belum ada metode penelitiannya, letakkan sebelum hasil penelitiannya.		
20-11-2021	X		- Acc Skripsi		

Pekanbaru, 09 Desember 2021

WAKIL DEKAN I




Dr. Hj. Ellvan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 1779/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 20 Desember 2021, Maka pada Hari Selasa 21 Desember 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Nia Audina |
| 2. NPM | : 175310573 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. |
| 5. Tanggal ujian | : 21 Desember 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 71,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA | (.....) |
| 2. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA | (.....) |
| 3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak | (.....) |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak | (.....) |
|---------------------------------|---------|

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

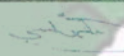
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

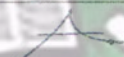

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nia Audina
NPM : 175310573
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hari/Tanggal : Selasa 21 Desember 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 73)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 21 Desember 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1030/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVII/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred.Dip.III/2014, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Nia Audina
 N P M : 175810573
 Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Kabupaten Kepulauan Meranti)

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 31 Agustus 2020
 Dekan,

[Handwritten Signature]
Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647


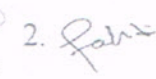

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nia Audina
 NPM : 175310573
 Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
 Hari/Tanggal Seminar : Rabu 17 Maret 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Anggota	2. 
3.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 An.Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 17 Maret 2021
 Sekretaris,

Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 1779 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nia Audina
N P M : 175310573
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/e	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Desember 2021
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NIA AUDINA
NPM : 175310573
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 13 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Maret 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA DESA KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Yang memberi pernyataan,

NIA AUDINA

175310573



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : NIA AUDINA
NPM : 175310573
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLAAN DANA
DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI

Disetujui Oleh:

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Azwirman, Dr, SE. M.Acc., CPA

()

2. Yolanda Pratami, S.E.,M.AK

()

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi S1

Pembimbing,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Zulhelmy, Dr, SE, MSi, Ak., CA.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa Di Kabupaten Meranti.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuisisioner (Angket). Sampel dalam penelitian ini adalah 30 nama desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linear bergandadengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat pengelolaan dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara parsial variabel kompetensi aparat pengelolaan dana Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, komitmen organisasi pemerintah Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa , Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village fund management apparatus competency, village government organizational commitment and community participation on village fund management accountability in Meranti district.

Methods Data collection is done by using a questionnaire (Questionnaire). The sample in this study were 30 names of villages in the Meranti Islands Regency. . This research was analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS.

The results of this study indicate that the variables of the competence of the village fund management apparatus, the commitment of the village government organization, the participation of the community together affect the accountability of village fund management. Partially, the competency variables for village fund management officers affect the accountability of village fund management in the Meranti Islands Regency, the village government organizational commitment affects the accountability of village fund management in the Meranti Islands Regency, community participation affects the accountability of village fund management in the Meranti Islands Regency.

Keywords: *Village Fund Management Accountability, Village Fund Management Apparatus Competence, Village Government Organizational Commitment, Community Participation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, berkat rahmat dan karunianya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Islam Riau.

Pada saat mengerjakan skripsi ini penulis banyak mendapatkan perhatian, imbingan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam melakukan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. **Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.** Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu **Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dr. Hj. Siska, SE, M.Si AK., CA.** Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dian Saputra, SE., M.Acc., AK.CA.,ACPA.** Selaku Sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., AK. CA., ACPA.** Selaku dosen Pembimbing yang telah banyak bersabar menghadapi penulis, dan telah

meluangka waktu, perhatian, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan dan melayani dalam pengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu kepala desa dan perangkat desa di desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah bersedia memberikan waktunya untuk mengisi beberapa pertanyaan dari kusioner penulis sehingga dapat mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Teristimewa penulis ucapkan Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya Bapak Sunardi, Ibu Rita Farida, Abang Ryan April Sandi, dan Firdaus.
9. Teman-teman terbaik dan seperjuangan Galy Nuryendri putra, Finna, Ida, Sintya, Chindy, Winia, Reza, Gita, Mawar, Melati, Riola, Maulaya, Ira, atas bantuan segalanya yang tidak terhingga, dorongan semangat yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata sungguh luar biasa.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Semoga pengorbanan dan bimbingan terhadap penulis selama ini mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan masukan

dari pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pekanbaru, September 2021

Penulis

Nia Audina
175310573

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1_PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	9
1.2.Tujuan Penelitian.....	9
1.3.Manfaat Penelitian.....	10
1.4.Sistematika Penulisan	11
BAB TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	12
2.1. Telaah Pustaka.....	12
2.1.1. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa	12
2.1.2. Kompetensi Aparat Desa.....	15
2.1.3. Kepala Desa.....	18
2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa	18
2.1.5. Perangkat Desa	19
2.1.6. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	20
2.1.7. Partisipasi Masyarakat	23
2.1.8. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	29
2.1.9. Konsep Akuntabilitas.....	33
2.1.10.Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, dan pembinaan dan pengawasan Alokasi dana Desa (ADD).....	35
2.2 PenelitianTerdahulu	38
2.3 Kerangka Pemikiran	42
2.4 Hipotesis.....	44
BAB III_METODE PENELITIAN	47

3.1. Desain Penelitian.....	47
3.2. Objek Penelitian	47
3.3. Definisi Variabel Penelitian	47
3.4. Populasi dan Sampel.....	49
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7. Analisis Statistik Deskriptif	51
3.8. Teknik Analisis Data	52
3.8.1. Uji Validitas dan Uji Relibialitas.....	52
3.8.2. Uji Asumsi Klasik.....	53
3.9. Model Analisis Data	55
3.10. Uji HipotesisPenelitian	56
3.11. KoefisienDeteminasi.....	57
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Kepulauan Meranti	58
4.2 Data Penelitian	59
4.3 Uji Validitas	66
4.4 Uji Reliabilitas.....	69
4.5 Analisis Asumsi Klasik.....	70
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.7 Uji T.....	78
4.8 Uji F.....	80
4.9 Interpretasi Hasil.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Konstruk, Dimensi dan Indikator Variabel.....	46
Tabel 3.2 Daftar Nama Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	49
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	61
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi Kerja.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparat (X_1).....	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X_3).....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3).....	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).....	67
Tabel 4.10 Reliabilitas Variabel.....	68
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	72
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	74
Tabel 4.13 Analisis Regresi Berganda Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	75
Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi.....	77
Tabel 4.15 Uji T.....	78
Tabel 4.16 Uji F.....	80
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	80

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4.1 Normal P-P Plot.....	70
Gambar 4.2 Normal P-P Plot.....	71
Gambar 4.4 Uji Heterokedastitas.....	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas adalah perihal pertanggungjawaban keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Maridasmo (2006:3)).

Mardiasmo 2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mnegontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa menimalisir terjadinya kecurangan.

Desentralisasi adalah wewenang pemeritahan yang diberikan pusat kepada daerah (Bicu, 2013:120). Desentralisasi terdiri dari berbagai aspek yaitu desentralisasi politik (demokrasi), desentralisasi adminitratif (dekonsentrasi), dan desentralisasi fisikal (Francis dan James, 2003:326, Agrawal dan Riot 1999:3).

Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Hal ini disebabkan adanya desentralisasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai wewenang dan tanggungjawaban yang dilimpahkan kepadanya.

Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat ditingkat bawah dapat dilaksanakan. Di Indonesia, salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada Desa.

kewenangan kepada Desa dilegitimasi dengan diterbitkannya berbagai regulasi. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada Desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat Desa. Ini jelas terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamankan untuk Pembangunan Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan Desa. Hal ini yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan (KementrianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan Desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat Desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan di Desa sangat kompleks, menjadikan alasan untuk Desa

menjadi berkembang kemjuan pembangunan dan setiap Desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Pembangunan Desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan Desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras pelaksanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Desa.

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana Desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, jumlah penerapan anggaran desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebesar 130 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut, pada tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 Triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59.86 Triliun atau 98,77%, dan pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 Triliun atau 60,29%. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama 2 tahun terakhir

menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta dan di tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta.

Bagi sebagian besar yang masuk dalam kategori minus, dana desa merupakan sumber pembiayaan dalam bagi desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa. Lebih-lebih sebagai besar dalam struktur keuangan desa, dana desa menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendamping desa serta yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat dana desa.

Dalam konteks pengawasan dana desa, agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat desa akan sangat efektif apabila dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan, selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung. Bentuknya dan masyarakat (sosialisasi) tentang perlunya kepedulian masyarakat desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, perlu ditingkatkan terutama oleh instansi yang mempunyai kewenangan pembinaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatannya lebih luas lagi karena berdasarkan kewenangannya. BPD melakukan pengawasan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, BPD merupakan Lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan praturan desa tentang APBDes Bersama kepaladesa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan mengevaluasi laporan keterangan pengelenggaraan pemerintah desa.

Sedangkan pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektor maupun Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, dimana untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit dana desa oleh BPKP, didasarkan pemerintah aparat penegak hukum, bagi kasus yang dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan dan desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa yaitu aparat pemerintah desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang selama

ini terkesan masih relative rendah. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa di indikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurang mampu mengoperasikan alat elektronik, kurangnya pengalaman dibidangnya, kurang paham dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Permasalahan yang didapat berdasarkan pendapat dari para warga masyarakat yang hendak mengurus surat-surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain-lain. Kondisi ini hampir berlaku disemua desa dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi penelitian ini. Hal ini ternyata di pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa itu sendiri, seperti tingkat Pendidikan formal, pelatihan/keterampilan atau Pendidikan non-formal, pengalaman dan sikap dalam menjalankan tugasnya itu masih kurang berdasarkan pengamatan penelitian sebelumnya dan itu merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauh mana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri.

Dalam mencapai tujuan organisasi maka aparatur yang ada di kantor desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebaiknya mempunyai keahlian yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya, maka sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan keahlian untuk menjalankan tugasnya dengan baik, melayani dan memenuhi kebutuhan aparat pemerintah desa atau pun petugas yang benar-benar menguasai bidangnya dan bertanggungjawab para manajer dan pimpinan dapat meningkatkan kualitas pegawainya dengan melakukan program

pengembangan, peningkatan pengetahuan dan keterampilannya, baik itu dengan melalui pemerintah Pendidikan dan pelatihan guna menciptakan kinerja yang baik. Menurut aturan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDes) termasuk dana desa itu mestinya diumumkan atau sebaiknya dipampang secara terbuka ditempat yang mudah dilihat agar diketahui oleh masyarakat sekitar. Namun kenyataannya tidak seperti itu (inilahkoran.com). Maka dibutuhkan Kerjasama dengan Lembaga penegak hukum yang ada, agar tidak terjadinya penyimpangan atau adanya kesalahan dalam bidang adminitrasi yang bisa menimbulkan dampak hukum.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gamaliel, Mada, kalangi, dan Erla (2017) dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Komitmen Oragnisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo". Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan responden 120 responden ini yaitu menunjukkan kompetensi aparat pengelolaan dana Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang artinya semakin kompeten pengelolaan Dana Desa dan semakin intens partisipasi dari masyarakat maka pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel. Selanjutnya Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa" (Studi Empiris

Pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan). Penelitian yang dilaksanakan di 19 Desa di Kecamatan Bintan Utara, GunungKijang, Seri Kuala Loban, Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Toapaya Kabupaten Bintan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi Bintan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa dan semakin intens partisipasi masyarakat, makapengelolaan Dana Desa semakin akuntabel. Dan Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”, Penelitian yang dilaksanakan di 75 Desa pada Kecamatan Arandakan, Sanden, Pajangan, Sedayu, Pandak, Kasihan, Bantul, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Sewon, Jetis, Imogiri, Banguntapan, Plerert, Piyungan dan Dingo Kabupaten Bantul ini menunjukkan hasil kompetensi aparat pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang akuntabel sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa yang akuntabel.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian dan penulis yang lakukan adalah waktu dan lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kompetensi aparat pemerintahan desa sehingga dapat menjawab pertanyaan tentang adakah pengaruh kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan harapan masyarakat

agar pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih berkompeten dan memiliki kualitas yang memadai dalam menjalankan pemerintahan desa dan juga dalam mengelola keuangan desa sehingga pembangunan didesa tersebut dapat terealisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Komitmen organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di KabupatenKepulauan Meranti?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di KabupatenKepulauan Meranti?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di KabupatenKepulauan Meranti?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan, dan menambah wawasan terutama mengenai dana desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta masukan yang positif untuk perkembangan dan kemajuan Desa terutama dalam hal akuntabilitas dana Desa.

3. Bagi Penelitian lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam penelitian dibagi menjadi perbab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian di berikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa maupun bagi penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

1) Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai Desa menegaskan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam Kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang itu memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaja, 2005:84).

Pengertian Desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa :

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah maka dinamika masyarakat pada tingkat Desa dapat terwadahi dalam tiga institusi berikut ini :

- 1) Pemerintah Desa merupakan unsur unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif Desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahdesa.
- 3) Lemabaga kemasyarakatan Desa seperti LKMD, karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja, 2005:94).

Pemerintah Desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara Pemerintah Desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum.
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah.
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Keberagaman, dan
- j. Partisipatif.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan :

- 1) Prakarsa Masyarakat.
- 2) Hak asal usul, dan/atau
- 3) Hak Tradisional, serta diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

2) Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah :

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa".

Menurut Sujaweni (2015:7) Pemerintah Desa dinyatakan sebagai berikut:

Lemabaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatu r masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

2.1.2. Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksana atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan

mengindikasikan cara perilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat memuaskan di tempat kerja, secara garis besar, kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja, mengidentifikasi, karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja.

Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi :

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri adalah sikap nilai-nilai atau citra dari seseorang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisika atau mental tertentu.

Terdapat lima kategori kompetensi, yaitu :

1. *Task Achievement*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik, kompetensi berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif,

efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi, memiliki hubungan kerja yang baik dengan orang lain. Kompetensi dengan komunikasi, memiliki hubungan kerja yang baik dengan orang lain. Kompetensi meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antara pribadi. kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. *Personal Attribute*

Kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar dan berkembang ,kompetensi ini meliputi : integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir stress, berpikiranalisis, dan berpikir konseptual.

4. *Managerial*

Kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memperdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership*

Kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi.

Kompetensi ini meliputi : Kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasi, mengembangkan fokus dan maksud, nilai-nilai.

2.1.3. Kepala Desa

Pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan kemasayarakatan dan memiliki wewenang :

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasi.
7. Membina perekonomian Desa.

2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat anggota BPD terdiri dari Rukun warga, dan pemangku rakyat, golongan, profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka lainnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD mempunyai wewenang :

- a) Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f) Menyusun tata tertib BPD.

2.1.5. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dengan demikian perangkat Desa bertanggung jawab kepada Desa.

Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, perangkat Desa lainnya terdiri dari ;

- a) Sekretaris Desa
- b) Pelaksanaan teknis lapangan
- c) Unsur kewilayahan

Jumlah perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat setempat. Sekretaris Desa di isi dari pegawai Negri sipil yang memenuhi syarat yaitu ;

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
- b) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
- c) Mempunyai pengalaman di bidang adminitrasi keuangan dan bidang perencanaan.
- d) Mempunyai pengalaman dibidang perkantoran.
- e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- f) Bersedia tinggal di Desa bersangkutan.

Sekretaris Desa di angkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Desa dan keputusan kepala Desa. Usia perangkat Desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling 60 (enam puluh) tahun.

2.1.6. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

1) Pengertian Komitmen

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Pegawai-pegawai yang merasa lebih berkomitmen pada organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa diandalkan, berusaha untuk tinggal lebih lama didalam organisasi, dan mencurahkan lebih banyak upaya dalam bekerja.

Menuru Zurnali (2010) komitmen merupakan perasaan yang kuat dan erat dari seseorang terhadap satu tujuan dan nilai suatu instansi dalam hubungannya dengan peran mereka terhadap upaya pencapaian tujuan

dan nilai-nilai tersebut. Sementara itu Soekidjan (2009) komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan instansi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan instansi yang intinya mendahulukan misi instansi dari pada kepentingan pribadi.

Adapun indikator dari komitmen kerja menurut Allen dan Mayer (1993) dalam Eva Kriss (2009), yaitu :

1. *Affective committment* atau komitmen efektif

Komitmen efektif terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional.

2. *Continuance commitment* atau komitmen

Komitmen berkelanjutan adalah perasaan berat untuk meninggalkan instansi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan instansi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam instansi.

3. *Normative Commitment* atau komitmen normatif

Komitmen normatif timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

2) Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa

Komitmen dalam penelitian ini konstruksikan berdasarkan deskripsi komitmen organisasi, dikarenakan pemerintah Desa merupakan

suatu organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterliatan yang relatif kuat terhadap organisasi. Steers dan poster memandang komitmen sebagai suatu sikap. Menurutnya orang yang memiliki komitmen adalah orang yang bersedia melibatkan diri terhadap organisasinya. Orang tersebut mau menyumbangkan segala sesuatu yang ada pada dirinya demi kepentingan organisasi, dengan maksud agar organisasi tersebut tetap dalam keadaan baik.

Komitmen terhadap suatu organisasi melibatkan tiga aspek yaitu:

- a) Rasa identifikasi dengan tujuan organisasi
- b) Perasaan terlibat dalam tugas-tugas organisasi.
- c) Perasaan setia terhadap organisasi. Bukti penelitian bahwa tidak adanya komitmen dapat mengurangi efektivitas organisasi. Orang yang memiliki komitmen cenderung tidak berhenti dan menerima pekerjaan (John M. Ivancevich, Loe Cit., 234)

Seperti halnya kepuasan kerja terdapat hasil komitmen, ringkasan penelitian dari dahulu hingga sekarang menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen organisasi dan hasil yang diinginkan, yaitu seperti kinerja yang tinggi, tingkat pergantian pegawai yang rendah, dan tingkat ketidakhadiran yang rendah.

3) Pentingnya Komitmen

Konsep partisipasi dalam implementasi kebijaksanaan dan strategi organisasi berkisaran pada prinsip bahwa seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan merasa *comitte* untuk melaksanakannya

dengan hasil yang maksimal. Suka atau tidaknya memperoleh komitmen itu bukanlah merupakan masalah yang fundamental. Yang dimaksud fundamental ialah bahwa agar kebijaksanaan dan strategi yang telah di tetapkan terlaksana dengan baik, keseluruhan organisasi harus komit terhadap pelaksanaannya secara berdayaguna dan berhasilguna, artinya mutlak di perlukan komitmen dari setiap individu.

Komitmen seseorang dengan pekerjaannya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena seseorang yang mempunyai komitmen maka ia cenderung akan melakukan pekerjaannya dengan giat, bersungguh-sungguh, bertanggungjawab serta memiliki loyalitas yang baik pada pekerjaan, pimpinan, maupun organisasi tempatdimana ia bekerja. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki komitmen maka ia akan melaksanakan tugasnya dengan baik, namun komitmen tersebut bisa berada pada tingkat yang tinggi maupun yang rendah. Tinggi dan rendahnya komitmen di pengaruhi oleh tingkat perkembangan dan proses kejiwaan seseorang.

2.1.7. Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari

pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian "*a voluntary process by which people including disadvantage (income, gender, ethnicity, education) influence or control teh affect them*"(Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk uang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada protek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahanya ditentukannya sendiri.
4. Partisipasia dalam suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staff yang melakukan persiapan, pelaksanaan,

monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dan seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, minotoring sampai pada tahap evaluasi.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valdermadalam Siti Irene Astuti D, (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi lebih mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggan kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

- a) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia

memeberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan, sedangkan hak politik sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

- b) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga -lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang disiplin dapat mempresentasikan kehendak masyarakat.
- c) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d) Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukanlah yang insidental.
- e) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- f) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah, dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga

dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dilingkungan dan kebasahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif(artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara.

3) Macam-Macam Partisipasi dalam Masyarakat.

Cohen dan Uphoff dalam Siti IrineAstuti (2009:39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. ketiga, partisipasi dalam kemanfaatan. dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintergrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena

masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti, 2009:39). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dan rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintahan dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti (2009:39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi : pertama, koordinasi dan kedua penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu

program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff.

2.1.8. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1) Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Dasar hukum pengaturan Desa dan Dana Desa adalah UU no.6 Tahun 2014, PP 47/2015 dan PP/2016.

A. PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

a) PERMENDAGRI :

a. Permendagri no. 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa

b. Permendagri no. 112/2014 tentang pemilihan kepala Desa.

c. Permendagri no.113/2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

d. Permendagri no 114/2014 tentang pedoman pembangunan
Desa

b) PERMENDES

a. Permendes no. 1/2015 tentang pedoman kewenangan lokal
berskala desa

b. Permendes no. 2/2015 tentang musyawarah desa

c. Pemendes no. 3/2015 tentang pendamping desa

d. Pemendes no. 4/2015 tetang pendirian, pengurusan,
pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

d. Permendes no. 19/2017 tentang prioritas penggunaan dana
desa TA 2018

c) Perke LKPP no.13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan
barang/jasa di desa sebagaimana diubah perka LKPP no.22/2015

B. PP 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP 60/2014 tetntang dana
desa yang bersumber dari APBN.

a) PMK no. 257/PMK.07/2015 tentang tatacara penundaan
dan/atau pemotongan dana pertimbangan terhadap daerah yang
tidak memenuhi Alokasi dana Desa.

b) PMK no. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian,
penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

c) PMK no. 49/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer
kedaerah dan dana desa sebagaimana diubah dengan PMK no.
112/PMK.07/2017.

2) Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran;

1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional. Badan permusyawaratan desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah ;

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagaimana masyarakat Desa
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur perdesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial

e. Meningkatkan pendapatan Desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Kepala mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan. Bagian pemerintahan Desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan Daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asli daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah kerekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

2.1.9. Konsep Akuntabilitas

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas. Kinerja instansi pemerintahan merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan ialah adanya/terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada alasan masing-masing lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Dan akhirnya disampaikan kepada Presiden yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP). PP Nomor Tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ada hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reabilitas dan prediktibilitas, suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparans dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang adminitrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawaban para pengambilan keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

2.1.10. Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, dan pembinaan dan pengawasan Alokasi dana Desa (ADD).

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungja waban dan pembinaan dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,35,36,37,38 dan 44 tentang pengelolaan keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD

- 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan ADD

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan ADD

Bendahara Desa wajib :

1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan :Buku kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama
- 2) Laporan Semester akhir tahun, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir.

5. Pertanggungjawaban.

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Diinformasikan kepadamasyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c. Disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan kekayaan Miliki Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan
- 3) Laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Medianti Larastika (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa	Analisis kuantitatif	<p>1. Variabel Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa</p> <p>2. Variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa</p>
2.	Mada Sarifudin Linje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Partisipasi	Analisi Kuantitatif	1. Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Positif dan signifikan

		Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo		<p>terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa</p> <p>2. Komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
3	Widyatama, Arif, Lola Novita, dan Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengalokasi dana Desa	Analisis Kuantitatif	<p>1. Kompetensi Aparat urtidakberpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD</p> <p>2. Sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD</p>
4	Aditya Nugroho Jati (2015)	Kompetensi Aparatur desa dalam menghadapi	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dapat dilihat

		Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi kasus tentang pengelolaan anggaran desa Toapaya Selatan)		melalui pengetahuan, pemahamn, kemampuan, nilai, sikap minat. Kompetensi aparatur desa di desa Toapaya Selatan dalam pengakolasi dana desa telah sasaran, namun untuk pemerataan pembangunan di Desa Toapaya belum berjalan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel kompetensi aparatur desa. Perbedaannya yaitu penelitian ini ada variabel independen partisipasi masyarakat dan pemanfaatan informasi dan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Feecky M. Pangemanan dkk (2017)	Pengaruh Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan

		<p>pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017</p>		<p>transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek atau studi kasusnya. Dalam penelitian tersebut yang dijadikan studi kasus atau objek adalah penyusunan APBDesa.</p>
6	<p>Linda Widowati dkk. (2016)</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun (2016)</p>	<p>Analisis Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dana desa Tahun 2016 oleh pemerintah desa Sridadi kurang akuntabel disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengaturan struktur kerja yang berdasarkan senioritas, kualitas sumberdaya aparatur yang rendah budaya kerja pemerintah desa yang belum berbasis data dan busaya masyarakat yang pasif serta akses informasi yang terbatas. Terdapat variabel yang terkait</p>

				dalam penelitian ini yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat dipengaruhi oleh variabel kualitas sumberdaya aparatur, budaya masyarakat yang masih pasif, dan terkait pemanfaatan informasi.
7	Larastika Medianti (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kabupaten Binatn)	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel independen kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel dependen pengelolaan dana desa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka berfikir merupakan gambaran tentang konsep bagai manafaktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

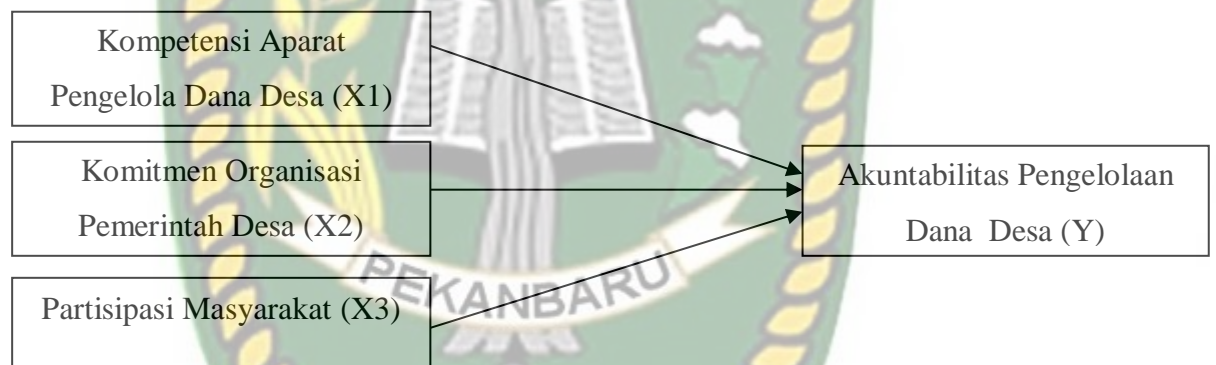
menguji secara empiris pengaruh aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Kepulauan Meranti

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas jabtanya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesuinak, efektif dan efesien. Kompetsni merupakan sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperdiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksasnkkan tugas dengan efektif. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direflesikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai profesinya (peraturan pemerintah No.23 tahun 2004)

Menurut Wijaya, David (2018) partisipasi masyarakat desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi,. Pengaruh yang didapt dari penerapan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, tranparansi dan partisipasi masyarakat desa dapat menentukan seberapa besar akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa adalah pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan yang dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas akan tampak gambar paradigma penelitian berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Berkaitan dengan dana desa tentu saja kompetensi sumber daya manusia yang sangat diperlukan. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya (Umaira, 2019).

Kompetensi aparatur desa dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja. Sumber daya manusia mencakup pada Pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan (Kristianto, 2018). Artinya bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugasnya maka akuntabilitas tidak akan tercapai (Umaira, 2019).

Hasil penelitian dari Widayatama (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H1 :Kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah :Cavoukian et al (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas.

Behnam dan MacLean (2015), menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Komitmen organisasi adalah kesanggupan pegawai dalam melakukan tugas melampaui harapan. Semakin tinggi komitmen organisasi semakin tinggi serta bangga sebagai pegawai yang telah turut serta dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila seseorang individu memiliki komitmen dalam

mencapai tujuan organisasi, maka hal ini dapat mempengaruhi Tindakan dan konsekuensi kinerjanya. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan keinginan yang kuat untuk tetap berada dalam organisasi, keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H2 :Komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk terlihat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Dalam organisasi public, partisipasi masyarakat menjelaskan tentang bagaimana masyarakat ikut adil dalam segala hal yang berhubungan untuk pengambilan keputusan yang demokratis, terutama saat ikut serta dalam pemecahan masalah pemerintah desa.

Menurut UNPD dalam Renyowijoyo (2013:12) *participation* yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Banyak warga menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim dan Schachrer, 2013 : 462). Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif metode survey. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh menggunakan instrumen kusioner. Populasi dari penelitian ini adalah pengelola dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari atas, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Masyarakat Desa, dan Lembaga Adat Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 Desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan penelitian ini pun dilaksanakan setelah mengikuti ujian proposal.

3.3. Definisi Variabel Penelitian

Dalam pengukuran ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa (Y) dan variabel independennya adalah Kompetensi Aparat

Pengelola Dana Desa (X1), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3).

Tabel 3.1
Konstruk, Dimensi dan Indikator Variabel

Konstruk	Dimensi	Indikator
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (Edison <i>et al</i> , 2016)	Pengetahuan (<i>knowledge</i>) kemampuan (<i>skill</i>) Sikap (<i>attitude</i>)	a. Pengetahuan b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan c. Keahlian Teknis d. Kemampuan mencapai solusi e. Inisiatif dalam bekerja f. keramahan dan kesopanan
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (Porter <i>et al</i> , 1974)	Afektif Keberlanjutan Normatif	a. Keyakinan terhadap tujuan organisasi b. perasaan memiliki organisasi c. Mempertahankan keanggotaan organisasi d. Kesetiaan dalam organisasi e. Kesiapan mengerahkan upaya atas nama organisasi
Partisipasi Masyarakat (Heller <i>et al</i> , 1984, dan Sujarweni (2015)	Pengambilan keputusan Penyusunan anggaran Pelaksanaan anggaran	a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program b. Mengusulkan rencana anggaran c. Terlibat dalam rapat paripurna d. Terlibat mengawasi dan melaporkan e. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran f. Memberikan penghargaan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Mahmudi, 2011)	Kejujuran dan Hukum Proses	a. Kejujuran dan keterbukaan informasi b. Kepatuhan dalam pelaporan

		c. Kesesuaian prosedur d. Kecukupan informasi e. Ketepatan penyampaian laporan
--	--	---

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 96 Desa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari suatu populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih sampel tersebut karena banyaknya terdapat laporan/keluhan masyarakat setempat mengenai pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan padahal desa tersebut letaknya tidak jauh dari pusat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,

Kemudahan dalam mengakses desa tersebut guna melakukan penelitian, desa-desa tersebut sering mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah dalam hal pembangunan desa. Namun, pembangunan yang dilaksanakan tidak memenuhi standar kualitas yang ada. Dan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum, Toko Masyarakat. Berikut ini adalah tabel daftar nama desa yang akan diteliti pada Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.2
Daftar Nama Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Nama Desa	Jumlahkuisioner yang dibagikan
1	Banglas	7
2	Banglas Barat	7
3	Alah Air	7
4	Alah Air Timur	7
5	Alai	7
6	Insit	7
7	Gogok Darul Salam	7
8	Mantiasia	7
9	Alai Selatan	7
10	Maini Darul Aman	7
11	Mekong	7
12	Batang Malas	7
13	Sesap	7
14	Lukun	7
15	Mengkikip	7
16	Tenan	7
17	TanjungPeranap	7
18	TanjungDarulTakzim	7
19	Kundur	7
20	Tanjung	7
21	Bantar	7
22	Anak Setatah	7

23	TelagaBaru	7
24	Segomeng	7
25	Melai	7
26	Sungai Cina	7
27	Bokor	7
28	Lemang	7
29	SialangPasung	7
30	BimaMaju	7
	TOTAL	210

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiono (2012:193) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung melalui penyampaian kuisisioner kepada responden di lingkungan Organisasi Pemerintah Desa di tiga Kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik (metode) pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu berbentuk kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

3.7. Analisis Statistik Deskriptif

Analisi data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode analisis dan dimana data dikumpul, disusun, diinterpretasikan,

dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas merupakan salah satu ciri penting dalam penelitian keprilaku karena dengan validitas dan reliabilitas sebuah pembuatan skala atau alat ukur yang dibuat oleh penelitian untuk mengukur variabelnya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Validitas dan Reliabilitas memberikan gambaran keakuratan dan ketepatan pengukuran yang dilakukan oleh penelitian terhadap variabel-variabel yang diukur.

Untuk memahami, berikut adalah penjelasan dari Uji Validitas dan Reliabilitas :

3.8.1.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kusioner. Suatu kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut.

3.8.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu ketasbilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kusioner, suatu kusioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau persyaratan yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan statistik inferensial, khususnya statistik parametrik. Uji asumsi klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, Uji Heterokedastistitas dan Uji Multikolinieritas, dari ketiga uji tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

3.8.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua metode uji normalitas yaitu sebagai berikut :

- a. Metode grafik yaitu melihat menyebar data pada sumbu diagonal pada grafik *P-Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Metode Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi normal. Residual normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Priyatni, 2012;158 dalam Fernandes, 2015).

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots*, dimana sumbu X adalah sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *di-studentized*. Dasar pengambilan keputusan, yaitu :

1. Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur, menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2.3. Uji Multikolonieritas

Menurut Priyatno (2012:151) dalam Fernandes (2015) “Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen”. Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dapat korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi, jika VIF lebih besar dari 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

3.9. Model Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan penelitian adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan sedangkan variabel dependennya yaitu pengelolaan keuangan pemerintah desa. jadi persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
b ₀	= Koefisien Regresi
X ₁	= Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
X ₂	= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
X ₃	= Partisipasi Masyarakat
b (1,2,3,..)	= Koefisien Regresi
e	= Faktor Pengganggu (Error)

3.10. Uji Hipotesis Penelitian

Menurut Good and Scates (1954) dalam Suharyadi dan Purwanto (2015:91) hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan.

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara persial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel dasar.

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah :

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = $n - k - 1$, atau apabila

tingkat $\text{sig} < \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat $\text{sig} > \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar keputusannya adalah:

- a. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

3.11. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti beribu kota di Selatpanjang, yang berada di Pulau Tebing Tinggi, dipimpin oleh bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi. Saat ini, secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ}42'30''-1^{\circ}28'0''$ LU, dan $102^{\circ}12'0''-103^{\circ}10'0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj.Balai Karimun. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.714,19 km² dengan wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan luas 768 km² dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kecamatan terkecil dengan luas 81 km².

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan dan akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah sektor agropolitan. Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan (agropolitan) bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Bahkan hal ini sangat mungkin untuk dilaksanakan hal ini terkait komoditi tanaman yang dimiliki baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan tanaman kehutanan. Pentingnya pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kepulauan Meranti diindikasikan oleh ketersediaan lahan pertanian, tenaga kerja, telah terbentuknya kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) di sebagian besar petani, jaringan (network) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (competitive advantage) Kabupaten Kepulauan Meranti dibandingkan dengan daerah lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (coping). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan agropolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial local (local social culture).

4.2 Data Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dengan beragam teknik, diantaranya yaitu teknik wawancara, observasi, dan angket. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek, dan observasi. Sedangkan, kuesioner dilakukan dalam penelitian ini sebagai penguat dalam triangulasi data dari beberapa metode diatas. Setelah memperoleh data yang diperlukan

dan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang ada, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.2 Analisis Deskriptif Responden

Analisis Deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden penelitian. Pada penelitian ini terdapat 210 kusioner yang disebarkan tetapi hanya 115 yang dikembalikan oleh responden dan responden tersebut berupa 89 orang yang dikelompokkan dalam karakteristik atau gambaran responden. Adapun karakteristik untuk mengetahui identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan, salah satu tujuannya untuk memberikan gambaran objek yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik responden dalam sampel ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, Pendidikan terakhir dan lama bekerja. Untuk lebih jelas karakteristik responden ini, maka akan dijelaskan dalam tabel mengenai data responden sebagai berikut:

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada lampiran dan dapat ditabulasikan yang terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	64	55%
Wanita	51	45%
Total	115	100%

Sumber : SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan, dimana respon laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan. Responden laki-laki sebesar 55%, sedangkan responden perempuan sebesar 20.9%

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik berdasarkan Usia dapat dilihat pada lampiran dan dapat ditabulasikan yang terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
≥ 20-30 Tahun	12	9%
> 31-40 Tahun	48	42%
> 40 Tahun	55	54%
Total	115	100%

Sumber : SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari tingkat usia bahwa yang paling banyak bekerja yaitu dalam rentang usia >40 tahun yaitu sebesar 54%

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik berdasarkan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada lampiran dan dapat ditabulasikan yang terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMP	25	21%
SMA	36	31%

D3	29	25%
S1	30	26%
S2	11	9%
Lainnya	13	10%
Total	115	100%

Sumber : SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.3 jika dilihat dari tingkat pendidikan, pada pemerintah desa Kabupaten Kepulauan Meranti mayoritas berpendidikan SMA yaitu sebanyak 36 orang atau 31%. Menurut Francichandra (2010) dalam arini (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi atau pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik pula kinerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut.

4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik berdasarkan Lama Bekerja dapat dilihat pada lampiran dan dapat ditabulasikan yang terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
1-5	36	31%
6-10	22	19%
11-15	28	24%
16-20	14	12%
Diatas 21	15	12%
Total	115	100%

Sumber : SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.4 Sementara dilihat dari lama bekerja dapat pula diketahui bahwa aparatur pemerintah desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi responden mayoritas bekerja dalam rentang masa 1-5 tahun

yaitu sebanyak 36 orang atau 31%. Hal ini menunjukkan pegawai yang menjadi responden memiliki pengalaman yang cukup didalam pekerjaannya. Menurut Francichandra (2010) dalam Arini (2016) mengatakan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki akan dapat meningkatkan kemampuan bekerja, dengan kata lain akan meningkatkan kemampuan kinerja orang yang bersangkutan. Dengan demikian, pengalaman yang cukup dimiliki aparatur pemerintah desa Kabupaten Kepulauan Meranti ini menggambarkan bahwa pegawai telah mengerti dan mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga pengalaman tersebut menghasilkan kinerja yang baik.

4.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi Kerja

Karakteristik berdasarkan Divisi Kerja dapat dilihat pada lampiran dan dapat ditabulasikan yang terlihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi Kerja

Divisi Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Kepala Desa	9	7%
Sekretariat Desa	24	20%
Kepala Urusan Keuangan	21	18%
Kepala Urusan Umum	29	25%
Tokoh Masyarakat	32	27%
Total	115	100%

Sumber : SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 115 responden yang divisis kerja Kepala Desa Tahun sebanyak 9 orang dengan tingkat persentase 7%, Sekretariat Desa sebanyak 21 orang dengan tingkat persentase 20 %, kepala Urusan keuangan sebanyak 21 orang dengan tingkat

persentase 28 % Kepala Urusan Umum sebanyak 29 orang dengan tingkat persentase 25 % dan Tokoh Masyarakat tahun sebanyak 32 orang dengan tingkat persentase 37 %.

4.2.3 Tingkat Capaian Responden

Analisa deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut adalah Tingkat Capaian Responden Pervariabel sebagai berikut :

1. Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X1)

$$\text{Tingkat Capaian Responden (TCR)} = \frac{\text{Rata - rata}}{\text{Skor Ideal Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mean} = 27,3$$

$$\text{Skor Ideal Maksimal} = 35$$

$$\text{Kepuasan Kerja} = \frac{27,3}{35} \times 100\% = 78,2\%$$

Pada hasil yang dapat, mendapatkan skor sebesar 78,2 %. Hal itu berarti bahwa variable Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desamendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Karena menurut Arikunto (2013) menjelaskan Jawaban responden 61% - 80% kriteria jawabannya baik.

2. Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2)

$$\text{Tingkat Capaian Responden (TCR)} = \frac{\text{Rata - rata}}{\text{Skor Ideal Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mean} = 23,5$$

$$\text{Skor Ideal Maksimal} = 30$$

$$\text{Motivasi Kerja} = \frac{23,5}{30} \times 100 \% = 78,3 \%$$

Pada hasil yang dapat, mendapatkan skor sebesar 78,3 %. Hal itu berarti bahwa variable Komitmen Organisasi Pemerintah Desa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Karena menurut Arikunto (2013) menjelaskan Jawaban responden 61%-80% kriteria jawabannya baik

3. Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

$$\text{Tingkat Capaian Responden (TCR)} = \frac{\text{Rata - rata}}{\text{Skor Ideal Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mean} = 27,7$$

$$\text{Skor Ideal Maksimal} = 35$$

$$\text{Motivasi Kerja} = \frac{27,7}{35} \times 100 \% = 79,1\%$$

Pada hasil yang dapat, mendapatkan skor sebesar 79,1 %. Hal itu berarti bahwa variable partisipasi masyarakat mendapatkan hasil jawaban responden yang baik. Karena menurut Arikunto (2013) menjelaskan Jawaban responden 61%-80% kriteria jawabannya baik

4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

$$\text{Tingkat Capaian Responden (TCR)} = \frac{\text{Rata - rata}}{\text{Skor Ideal Maksimal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Mean} &= 28,28 \\ \text{Skor Ideal Maksimal} &= 35 \\ \text{OCB} &= \frac{28,28}{35} \times 100 \% = 80 \% \end{aligned}$$

Pada hasil yang dapat, mendapatkan skor sebesar 80 %. Hal itu berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Karena menurut Arikunto (2013) menjelaskan Jawaban responden 60 %- 80% kriteria jawabannya baik.

4.3 Uji Validitas

Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem SPSS versi 23.0, maka dapat diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparat (X_1)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Kompetensi Aparat(X_1),dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparat (X_1)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel 5\%}$	Status
		N = 115	Df = N = 115	
Kompetensi Aparat (X_1)	1	0,359	0,1816	Valid
	2	0,436	0,1816	Valid
	3	0,813	0,1816	Valid
	4	0,686	0,1816	Valid
	5	0,814	0,1816	Valid
	6	0,814	0,1816	Valid
	7	0,813	0,1816	Valid

Sumber : SPSS 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 115$ yang menunjukkan angka 0,1816, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Kompetensi Aparat dinyatakan “*valid*”.

2. Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X₂)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Komitmen Organisasi (X₁), dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X₃)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel} 5\%$	Status
		N = 115	Df = N = 115	
Komitmen Organisasi (X ₂)	1	0,739	0,1816	<i>Valid</i>
	2	0,601	0,1816	<i>Valid</i>
	3	0,698	0,1816	<i>Valid</i>
	4	0,673	0,1816	<i>Valid</i>
	5	0,670	0,1816	<i>Valid</i>
	6	0,643	0,1816	<i>Valid</i>

Sumber : SPSS 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 115$ yang menunjukkan angka 0,1816, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Komitmen Organisasi dinyatakan “*valid*”.

3. Uji Validitas Variabel Pasrtisipasi Masyarakat (X₃)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Pasrtisipasi Masyarakat (X₃) dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Pasrtisipasi Masyarakat (X₃)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel 5\%}$	Status
		N = 115	Df = N = 115	
Pasrtisipasi Masyarakat (X ₃)	1	0,654	0,1816	Valid
	2	0,602	0,1816	Valid
	3	0,700	0,1816	Valid
	4	0,522	0,1816	Valid
	5	0,654	0,1816	Valid
	6	0,594	0,1816	Valid
	7	0,691	0,1816	Valid

Sumber : SPSS 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} Product moment, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan df = 115 yang menunjukkan angka 0,1816, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan "valid".

4. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ((Y), dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel5\%}$	Status
		N = 115	Df = N = 115	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1	0,643	0,1816	Valid
	2	0,668	0,1816	Valid
	3	0,720	0,1816	Valid
	4	0,597	0,1816	Valid
	5	0,600	0,1816	Valid
	6	0,577	0,1816	Valid
	7	0,701	0,1816	Valid

Sumber : SPSS 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 115$ yang menunjukkan angka 0,1816, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desadinyatakan “valid”.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Setelah instrumen-instrumen pada variabel independen dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas (kehandalan) pada masing-masing variabel. Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Reliabilitas Variabel

Variabel	N =115		Rule of Thumb	Keputusan
	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha		

Kompetensi Aparat	7	0,812	0,6	<i>Reliabel</i>
Komitmen Organisasi	6	0,755	0,6	<i>Reliabel</i>
Pasrtisipasi Masyarakat	7	0,747	0,6	<i>Reliabel</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	7	0,762	0,6	<i>Reliabel</i>

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa seluruh instrumen berdasarkan analisis reliabilitas atas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk semua variabel adalah di atas 0,6, untuk itu seluruh variabel bisa dikatakan *realibel* (handal).

4.5 Analisis Asumsi Klasik

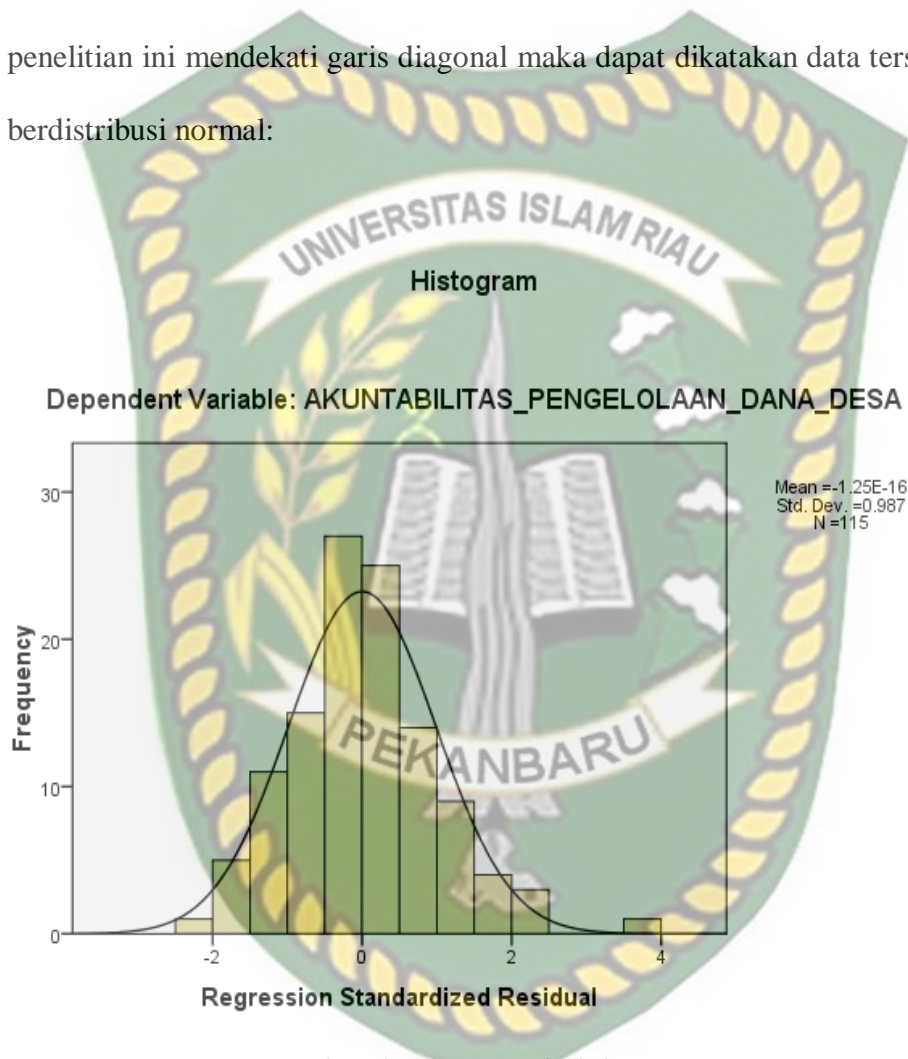
4.5.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian terhadap hipotesis dilakukan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap beberapa uji asumsi klasik agar dapat dihasilkan satu kesimpulan data yang benar/layak dalam pembentukan model penelitian yang efektif yang terbebas dari pembiasan variabel. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas untuk menguji normalitas data secara statistik dengan menggunakan histogram, uji normal P-P Plot dan *Kolmogorof Smirnof*, uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*), uji heterokedastisitas dengan menggunakan *Glejser* dan uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Wattson* statistik.

4.5.2 Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi

yang mendekati distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan melihat Histogram, Normal P-P Plot dan *Kolmogorov-Smirnov* . Jika titik-titik yang mewakili sampel dalam penelitian ini mendekati garis diagonal maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal:



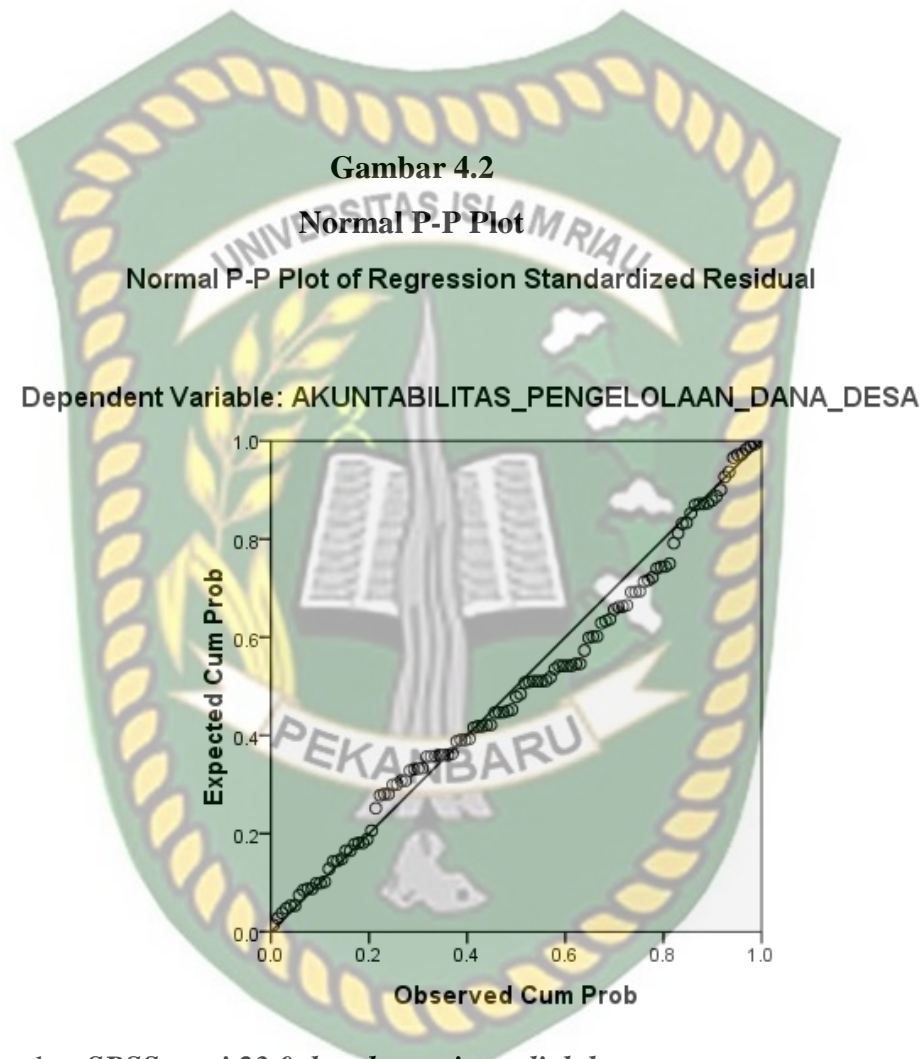
Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Gambar 4.1
Normal P-P Plot

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa uji normalitas tampak pada data menyebar ke seluruh daerah normal. Daerah normal itu sendiri adalah

daerah yang berada dibawah kurva tersebut yang bentuknya seperti lonceng terbalik.

Adapun pengujian normalitas dengan menggunakan normal P-P Plot pada gambar 4.2 sebagai berikut ;



Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini memiliki penyebaran dan distribusi yang normal karena data memusat pada garis diagonal *Probability-Plot*. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah normal. Uji normalitas juga didukung dengan uji *Kolmogorov*

Smirnov. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80889041
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.947
Asymp. Sig. (2-tailed)		.331

a. Test distribution is Normal.

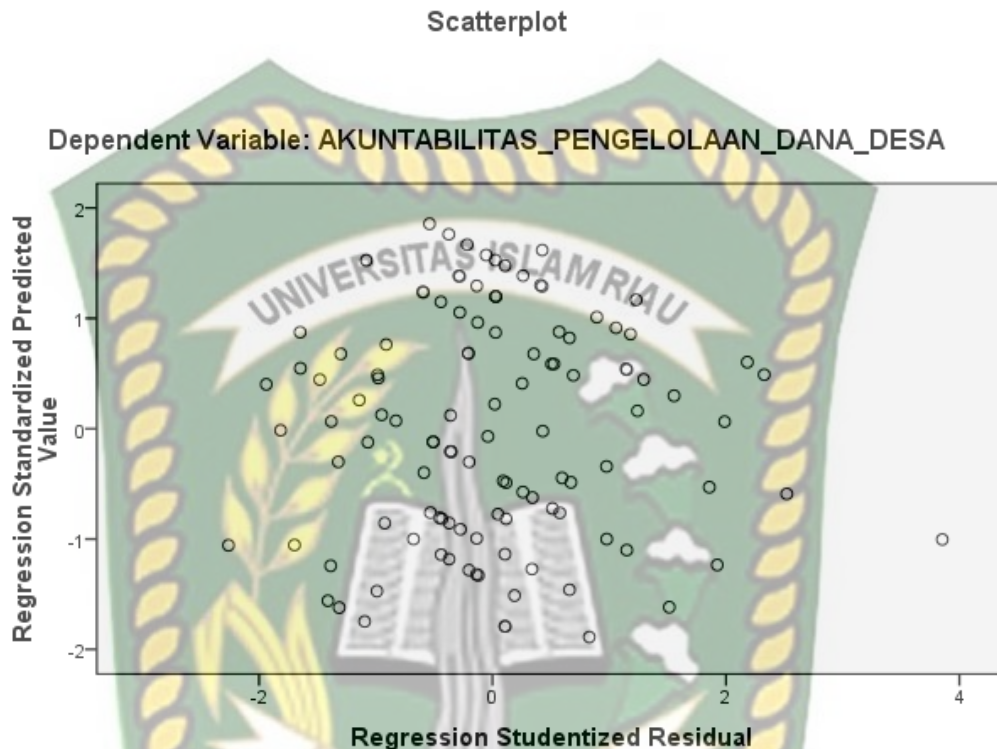
Sumber: *SPSS versi 23.0 dan data primer diolah*

Pada hasil pengujian Kolmogorov Smirnov terlihat pada tabel 4.11 bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 ($0,331 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal, dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

4.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dalam fungsi regresi. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat uji Sactter Plot dan *Spearman Rho*. Gambar Scatter plot dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 4.4
Uji Heterokedastitas



Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa signifikan pada uji Scatter plot menerangkan sampel lebih menyebar ke arah negatif maupun positif. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi homokedastitas data dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna atau yang pasti antara beberapa variabel independen. Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitasnya maka dapat dilihat dari nilai VIF (*Varian Inflation Factor*). Pedoman suatu model regresi yang dikatakan bebas masalah multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10. Hasil pengujian multikolinearitas antara variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
KOMPETENSI_APARATUR	.469	2.134
KOMITMEN_ORGANISASI	.524	1.909
PARTISIPASI_MASYARAKAT	.531	1.883

a. Dependent Variable:
AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_D
ESA

Sumber: *SPSS versi 23.0 dan data primer diolah*

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki tolerance value lebih kecil dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. nilai VIF untuk variabel Kompetensi Aparatur adalah ($2,134 < 10$) dan nilai tolerance sebesar ($0,469 > 0,10$), nilai VIF untuk Komitmen Organisasi adalah ($1,909 < 10$) dan nilai tolerance sebesar ($0,524 > 0,10$). nilai VIF untuk Partisipasi

Masyarakat adalah ($1,883 < 10$) dan nilai tolerance sebesar ($0,531 > 0,10$). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini lulus uji multikolinearitas.

4.5.2 Analisis Regresi Berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil pengolahan data dengan metode analisis regresi berganda variabel penelitian disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Analisis Regresi Berganda
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.774	1.503		1.181	.240
KOMPETENSI_APARATUR	.146	.063	.164	2.324	.022
KOMITMEN_ORGANISASI	.279	.074	.252	3.771	.000
PARTISIPASI_MASYARAKAT	.575	.068	.558	8.422	.000

a. Dependent Variable:

AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA

Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.13 di atas maka dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut:

Model 1: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

$$Y = 1,774 + 0,146 X_1 + 0,279 X_2 + 0,575 X_3 + e$$

Interpretasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,774 artinya apabila Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat tidak ada maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tetap sebesar konstanta 1,774.
2. Koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,146 artinya apabila Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat diabaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,146.
3. Koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,279 artinya apabila Komitmen Organisasi Pemerintah Desa ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat diabaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,279.
4. Koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,575 artinya apabila Partisipasi Masyarakat ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa diabaikan, maka akan

mengakibatkan kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,575.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisa koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (Ocb) Karyawan Pada Sekretariat Dprd Kab.Solok yang digambarkan pada tabel 4.14 berikut ini :

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.861 ^a	.741	.734	1.83317	1.470

a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI_MASYARAKAT, KOMITMEN_ORGANISASI, KOMPETENSI_APARATUR

b. Dependent Variable:

AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA

Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh angka R^2 (R square) sebesar 0,73 atau 73 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,73 atau 73 %. Sedangkan sisanya sebesar 0,27 atau 27 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.7 Uji T

Uji t dimaksud untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian ini bila probabilitas signifikan lebih kecil dari pada alpha 0,05 maka diperoleh H_0 ditolak dan H_a diterimaberarti ada hubungan dan bila probabilitas signifikan lebih besar dari pada alpha 0,05 H_0 diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada hubungan. Dari hasil olah data dapat disajikan pada tabel 4.15 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.15

Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.774	1.503		1.181	.240
KOMPETENSI_APARATUR	.146	.063	.164	2.324	.022
KOMITMEN_ORGANISASI	.279	.074	.252	3.771	.000
PARTISIPASI_MASYARAKAT	.575	.068	.558	8.422	.000

a. Dependent Variable:

AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA

Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_1) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai t_{hitung} Lebih Besar Dari Tabel $2,324 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana

Desa (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_2) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai t_{hitung} Lebih Besar Dari Tabel $3,771 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Partisipasi Masyarakat (X_3) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai t_{hitung} Lebih Besar Dari Tabel $8,422 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Partisipasi Masyarakat (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

4.8 Uji F

Uji koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan Uji F (ANOVA). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat

digeneralisasikan). Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16
Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1066.513	3	355.504	105.788	.000 ^a
	Residual	373.018	111	3.361		
	Total	1439.530	114			

a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI_MASYARAKAT, KOMITMEN_ORGANISASI, KOMPETENSI_APARATUR

b. Dependent Variable:
AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA

Sumber: SPSS versi 23.0 dan data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa tingkat nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan dengan nilai $f_{hitung} 570,741$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Untuk lebih jelasnya keempat hipotesis penelitian dapat disimpulkan pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Signifikan	Keputusan
H1	Kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,000	Diterima
H2	Komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,000	Diterima
H3	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	0,000	Diterima
H4	Kompetensi aparat pengelolaan dana desa, Komitmen organisasi pemerintahan desa Dan Partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,000	Diterima

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah

4.9 Interpretasi Hasil

4.9.1.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_1) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai t_{hitung} Lebih Besar Dari Tabel $2,324 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Variable Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa mendapatkan skor sebesar 78,2 %. Hal itu berarti bahwa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Dimana rata-rata responden menjawab setuju di jawaban kuisisioner mereka. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004:14). Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Subroto (2009), Irma (2015), Fajri (2015), Aziz (2016), Ferina (2016), Dewi (2016), dan Makalag (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.9.1.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X₂) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Komitmen Organisasi Pengelolaan Dana Desa (X₂) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai $t_{hitung} > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X₂) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). variable komitmen organisasi Pemerintah desa mendapatkan skor sebesar 78,3 %. Hal itu berarti bahwa variable Komitmen Organisasi Pemerintah Desa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Dimana rata-rata

responden menjawab setuju di jawaban kuisioner mereka. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah : Cavoukian et al (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011: 49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2002:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras dari pada lebih memperhatikan konstituen.

4.9.1.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa variable Partisipasi Masyarakat (X_3) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan nilai t_{hitung} Lebih Besar Dari Tabel $8,422 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Partisipasi Masyarakat (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Partisipasi Masyarakat mendapatkan skor sebesar 79,1 %. Hal itu berarti bahwa variable partisipasi masyarakat mendapatkan hasil jawaban responden yang baik. Dimana rata-rata responden menjawab setuju

di jawaban kuisioner mereka. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003: 309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003 : 818), seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dari Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Terdapat pengaruh secara Bersama-sama yang Positif dan signifikan Kompetensi aparat pengelolaan dana desa, Komitmen organisasi pemerintahan desa Dan Partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa tingkat nilai signifikan $0,000 < 0,050$ dan dengan nilai $f_{hitung} 570,741$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Kompetensi Aparat

Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

6. Berdasarkan tabulasi data hasil kuesioner, maka dapat disimpulkan variable variable Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa mendapatkan skor sebesar 78,2 %. Hal itu berarti bahwa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik. Lalu pada variable komitmen organisasi Pemerintah desa mendapatkan skor sebesar 78,3 %. Hal itu berarti bahwa variable Komitmen Organisasi Pemerintah Desa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik, Partisipasi Masyarakat mendapatkan skor sebesar 79,1 %. Hal itu berarti bahwa variable partisipasi masyarakat mendapatkan hasil jawaban responden yang baik. variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mendapatkan skor sebesar 80 %. Hal itu berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mendapatkan hasil jawaban responden yang sangat baik

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Perlu adanya pendampingan secara efektif dan efisien oleh pendamping desa, inspektorat, dan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD teknis yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Di Kabupaten

Kepulauan Meranti terhadap pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel.

2. Perlu adanya lembaga/aparat yang bertugas sebagai Internal Control dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Perlu dirancang panduan akuntansi atau standar akuntansi keuangan desa oleh Pihak terkait seperti kementerian dan IAI
4. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa perlu mensosialisasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dan melibatkan variabel-variabel yang relevan berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Diluar variabel Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat dengan menjadikan variabel lainnya Sebagai Variabel intervening ataupun moderasi maka hasil yang didapatkan akan berbeda. Dengan harapan hasil penelitian lebih akurat dan memiliki manfaat yang jauh lebih besar, sehingga perusahaan dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2011. Metode Pendidikan. Penerbit Remaja Rosda. Bandung.
- Arifiyanto, Dwi Febri., dan Kurrohman, Taufik. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3): 481-493.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13 (2): 193-211.
- Bicu, YS. 2013. Kamus Bahasa Indonesia. Penerbit Citra Harta Prima. Jakarta.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian pendidikan dan sosial. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 3 (6): 311-327.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2009, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3(7): 1099-1104.
- Ferina, Ika Sasti, 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 14 (3): 321-336.
- Handayani, Suci, 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Penerbit Kompip Solo. Surakarta.
- Hanif, Nurkholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penerbit Erlangga. Surakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. Indeks Desa Membangun 2015. Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.

- Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotabagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 7 (2): 148-159.
- Medianti, Larastika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dana Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan. *JOM FEB*. Volume 1, Eisi 1, No; 1-13.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik Profektik*. 1 (1): 1-21.
- Perdana, Wahyu Khaeril 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *JOM FEB*. Volume 1, Edisi 1 No: 1-13.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Rahmanurrajjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-Journal Adminitrasi Negara*. 3 (1): 119-130.
- Subroto, Agus, 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Prgoram Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. PenerbitPustaka Baru Press. Yogyakarta.

Widodo, Isto. 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Politik Indonesia. Indonesian Political Science Review. 2 (1): 66-86.

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. 1, (2): 21-37.

<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>.

Persendiakses pada tanggal 17 Februari 2021

